

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wacana untuk mendirikan pemerintahan dunia dengan menggunakan sistem Khilafah Islamiyah layaknya masa kenabian menjadi topik yang ramai di perbincangkan di dunia Internasional. Khilafah merupakan sebuah sistem pemerintahan yang bercorakkan Islam dengan menggunakan aturan syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada dasarnya, kata Khilafah memuat penjelasan tentang pemegang kepemimpinan dalam Daulah Islamiyah (Negara yang menggunakan syariat Islam). Pendirian Khilafah Islamiyah memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama ialah untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam menjalankan aktivitas bermasyarakat, serta menegakkan sebuah sistem perpolitikan dan aturan bernegara dalam wilayah atau batasan yang sudah ditetapkan dalam Islam.¹ Penyebaran paham Khilafah keseluruh penjuru dunia semakin masif dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional yang bernama Hizbut Tahrir (HT). HT merupakan sebuah organisasi Islam transnasional yang begitu lantang menyuarakan Khilafah. HT juga merupakan organisasi Islam transnasional terbesar di dunia yang aktif dalam melakukan aktivitas politik dan menyebarkan Ideologi Khilafah yang dibawahnya. HT berusaha untuk menyebarkan faham Khilafahnya keseluruh penjuru dunia untuk mengajak umat Islam bersatu dan mendirikan sebuah pemerintahan global yang dipimpin oleh seorang Khalifah dengan menggunakan syariat Islam.²

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 129

² Baran, Z. (2004). *Hizbut Tahrir: Pemberontakan Politik Islam*. Washington DC: The Nixon Centre

Secara historis HT didirikan tahun 1953 di Baitul Maqdis. Bermula dari pecahnya konflik antara Arab-Israel yang menginisiasi pendiri HT Taqiyuddin An-Nabhani untuk mendirikan khilafah Islamiyah yang dulu pernah berjaya lalu kemudian runtuh pada masa Turki Ustmani. Diawal pergerakannya Taqiyuddin An-Nabhani hanya melakukan pergerakannya di wilayah jazairah Arab, termasuk, Libanon, Yordania, Irak, Suriah dan Mesir. Akan tetapi, lajunya arus globalisasi membuat HT berhasil berdiaspora dan menyebar dengan cepat keseluruh penjuru dunia. Saat ini HT sudah mempunyai cabang yang tersebar di 45 negara di dunia, meliputi Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Asia.³ Dan tidak terlewatkan Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Diperkirakan HT pertama dibawa ke Indonesia pada permulaan 1980-an.⁴ Kemudian dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, ada pandangan lain dari Moh Iqbal Ahnaf menurutnya Ideologi HT sudah masuk ke Indonesia pada saat Taqiyudin An-Nabhani menyambangi Indonesia pada tahun 1972.⁵ Tidak ada kepastian waktu sejak kapan HT menyebarkan pahamnya ke Indonesia. Pada masa Orde Baru HTI sempat harus menggunakan nama samaran untuk menutupi identitasnya. Alasan penyamaran ini ialah sebagai upaya perlindungan pergerakan mereka dikarenakan rezim kala itu menganut politik “sapu bersih” terhadap kelompok yang dianggap membawa paham radikal.⁶

³ Awadallah, S. T. (2006). Yang Terkasih oleh Allah: Munculnya Cahaya dari Allah Peluncuran Masjid Aqsa dari Hizbut Tahrir March. London: Khilafah Publications

⁴ M. Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 97

⁵ Moh Iqbal Ahnaf, “MMI dan HTI: Image of The Others,” dalam A.Maftuh Gabriel, Negara tuhan: The Thematic Ensiklopedia (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hal 694.

⁶ Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi (Jakarta: LP3ES, 2008), hal 243-244

Ternyata HTI dicurigai termasuk kelompok yang membawa paham-paham radikal.

Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyampaikan sikap pemerintah Indonesia terhadap Organisasi masyarakat (Ormas) Islam HTI Pada 8 Mei 2017. Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa aktivitas Ormas Islam HTI bersinggungan bahkan mengancam eksistensi Pancasila sebagai Indonesia dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait peraturan tentang organisasi massa.⁷ Ormas Islam yang sudah cukup lama berdiri dan memiliki anggota yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia ini pada akhirnya kehilangan legalitasnya sebagai Ormas, Dan dianggap sebagai organisasi terlarang karena mengancam keutuhan NKRI.

Ansyad Mbaib Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT), mengemukakan cikal bakal radikalisme begitu lekat dengan aktivitas HTI dalam menyebarkan paham Khilafah Islamiyah yang dibawanya. Ansyad kemudian dengan tegas mengatakan bahwa terorisme merupakan anak ideologis dari radikalisme, dan paham radikalisme lebih mengerikan daripada tindakan terorisme. Arsyad mengatakan bahwa jika penyebaran ideologi ini terus dibiarkan oleh Negara maka Indonesia berpotensi akan menjadi seperti Irak.⁸ Dalam tanggapan ini Ansyad menganggap bahwa wacana Khilafah yang digaungkan oleh HTI mengganggu kedaulatan dan kerukunan antar umat

⁷ Kristian Erdianto, "Tempuh Jalur Hukum untuk Bubarkan HTI, Pemerintah Tunjukkan Sikap Jaga Pancasila"Kompas:2017 diakses pada Senin, 10 Januari 2022 pukul 10.56 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12084111/tempuh.jalur.hukum.untuk.bubarkan.hti.pemerintah.tunjukk.an.sikap.jaga.pancasila?page=all>

⁸ CNN INDONESIA, Eks Kepala Bnpt Ungkap Kaitan HTI Dan Radikalisme <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180301195549-12-279820/eks-kepala-bnpt-ungkap-kaitan-hti-dan-radikalisme>. Diakses pada 21 Maret 2022

beragama di Indonesia.

Gagasan Khilafah oleh HTI dianggap *non-mainstream* karena mengkampanyekan sebuah sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan dan ideologi Negara yang dipakai oleh Indonesia yakni Pancasila sebagai ideologi dan Demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara.⁹ Meskipun secara legalitas HTI sebagai Ormas sudah tidak memiliki izin untuk melaksanakan aktivitas organisasi dengan bebas namun ini tidak serta merta membuat gagasan dan wacana Khilafah hilang begitu saja. Berangkat dari kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap ideologi yang dibawa oleh HTI sebagai organisasi Islam Transnasional ini mendorong pemerintah Indonesia membuat kebijakan serta program-program untuk merespon eksistensi dari paham Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HTI. Pembahasan perihal Khilafah Islamiyah bukanlah hal baru dalam literatur umat Islam. Ada sekitar 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia pada Juni 2021. Lalu idapati, sebanyak 236,53 juta jiwa atau sekitar 86,88% memeluk agama Islam mengutip data yang diambil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.¹⁰

Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di Indonesia sudah diatur dan dijamin pada pasal 28 UUD 1945.¹¹ Pasal ini memuat hal pokok untuk penjagaan secara yuridis yang dibagikan oleh Negara Indonesia kepada seluruh warga Negeranya untuk dapat secara bebas mengekspresikan dirinya dalam kelompok, sejauh tidak didapati adanya

⁹ Tim Hizbut Tahrir, *Ajhzat al-Daulah al-Khilafah*, Beirut: Dar al-Ummah, 2005. Hal 23

¹⁰ Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada 20 Februari 2022.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E ayat (3)

intervensi dan tetap bergabung dalam sebuah organisasi yang dibangun dan dijalani oleh anggota organisasi tersebut tanpa ada paksaan untuk bergabung ke dalamnya.¹² Hal ini tentu menjadi sebuah kontradiktif dengan pembubaran HTI sebagai Ormas.

Bahkan pembubaran Ormas ini semakin menimbulkan kebingungan mengingat negara seharusnya hadir untuk memberikan jaminan atas kebebasan untuk menjalankan syariat agama bagi setiap warga negara sebagaimana hal ini berdasarkan amanat dalam pasal 29 UUD 1945.¹³ Negara seharusnya tidak banyak mengatur kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan ide dan gagasan yang bersumber dari ajaran agamanya dan dalam pasal ini dimuat pengertian bahwa Negara tidak seharusnya mengurus urusan syariat dan peribadatan agama yang biasanya terbentuk atau dibuat dalam ajaran kepercayaan agama setiap individu dan berdasarkan pada keyakinan masing-masing pemeluk agama yang mesti dijamin seutuhnya oleh negara.¹⁴ Inilah yang menjadikan penelitian ini kemudian penting dan menarik untuk dibahas mengapa kemudian wacana Khilafah yang dibawa oleh HTI ini mendapatkan respon yang serius dari pemerintah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pembubaran HTI pada tahun 2017 masih menyisakan masalah bagi pemerintah Indonesia. Ternyata meski cabang dari organisasi transnasional ini sudah dicabut badan hukumnya akan tetapi tidak turut serta menghentikan

¹² Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (2)

¹⁴ Siti Musdah Mulia, Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Era Reformasi, Disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM "Pengakuan HAM dalam 10 Tahun Reformasi", di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008

aktivitas serta penyebaran ideologi yang dibawa. Penyebaran Ideologi Khilafah yang dibawa HT oleh para anggota dan simpatisan kelompok ini terus berjalan. Sehingga memicu lahirnya respon pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyebaran paham yang dibawa oleh HT. Pembubaran Ormas Islam ini menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat Indonesia terlebih tidak ditemukan satupun fakta di lapangan adanya serangan brutal ke pihak pemerintahan karena ketidaksesuaian sistem yang dianut oleh pemerintah dengan tawaran sistem alternatif yang dibawa oleh Ormas Islam ini. Melihat pada persentase data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 2.722.300 jiwa penduduk Indonesia dan sekitar 2.363.000 jiwa atau 86,88% merupakan penduduk beragama Islam. Kemudian amanat UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh tiap-tiap warga. Serta terdapat pembentukan sebuah ide yang bersumber dari pernyataan aktor negara yang turut terlibat dalam mendorong lahirnya kebijakan. Isu perihal pertentangan Ideologi dibuat untuk menciptakan gangguan stabilitas keamanan serta kedaulatan. Isu Pemerintah Indonesia berhasil melegitimasi isu ini terbukti dengan dibubarkannya HTI pada 2017 serta beberapa program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menetralsir penyebaran ideologi yang dibawa oleh HT. Penelitian sangat penting untuk diteliti untuk dapat melihat alasan dibalik respon pemerintah Indonesia Wacana Khilafah yang dibawa oleh HT.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Indonesia merespon wacana Khilafah Islamiyah

yang dibawa oleh Hizbut Tahrir?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan respon pemerintah Indonesia terhadap wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi literatur dalam konteks memahami persepsi ancaman yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan pembaca untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir penyebaran wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh organisasi Islam Transnasional

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti mencari sebanyak mungkin penelitian relevan serta dapat dijadikan acuan untuk membahas topik penelitian yang diangkat. Adapun beberapa referensi yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Referensi pertama adalah artikel Jurnal yang ditulis oleh Fahlesa Munabari dengan judul *"Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State"*.¹⁵ Artikel Jurnal ini memberikan gambaran pandangan terkait pergerakan yang mengusung kebangkitan Islam yang ada di Indonesia terhadap kosep demokrasi dan *Nation State* (Negara-Bangsa). Beberapa

¹⁵ Munabari, Fahlesa; Larasati, Nadia Utami; and Ihsan, Rizky (2022) "Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State," Jurnal Politik: Vol. 5: Iss. 2, Article 5. DOI: 10.7454/jp.v5i2.263

kelompok Islam yang megusung kebangkitan Islam di Indonesia diantaranya Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam dan HTI. Pasca digulingkannya rezim presiden Soeharto pada tahun 1998 aktivitas pergerakan kelompok Islam di Indonesia mengalami peningkatan. Narasi penerapan syariat Islam hingga wacana pendirian pemerintahan Islam atau kekhilafahan Islam di Indonesia menjadi bahasan hangat dalam forum-forum diskusi dan perbincangan ditengah Masyarakat Indonesia. Beberapa kali didapati peringatan bahkan pembubaran diskusi-diskusi yang membahas tentang penerapan sistem Islam dan khilafah Islamiyah karena diskusi-diskusi ini melahirkan kritik-kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap tidak Islami dan sesuai dengan syariat Islam. Bebrapa protes seringkali dilakukan dengan aksi demonstrasi yang berisi narasi-narasi keras mengkritik kebijakan rezim sehingga pembubaran dengan cara represif oleh aparat sering terjadi. Hal ini dianggap mengganggu stabilitas politik dan konflik ditengah masyarakat Indonesia. Penelitian ini mengasumsikan bahwa konflik yang terjadi berawal dari ketidak sepakatan kelompok-kelompok gerakan Islam dengan konsep Negara-bangsa serta kritik penguasa yang dibatasi. Demokrasi juga dinilai sebagai sebuah konsep bernegara yang diadopsi dari barat sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang erat dan kental dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Berangkat dari latar belakang inilah kemudian penelitian ini dilaksanakan untuk dapat menganalisis perspektif gerakan Islam tentang negara-bangsa dan Demokrasi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa meskipun gerakan Islam yang ada di Indonesia bertujuan yang sama untuk menerapkan syariat Islam akan tetapi

ternyata interpretasi masing-masing kelompok terkait pendirian Khilafah Islamiyah Berbeda.

Penelitian ini membantu penulis memahami bagaimana perspektif kelompok-kelompok pergerakan Islam di Indonesia terhadap wacana pendirian Khilafah Islamiyah. Pada penelitian ini juga penulis mendapatkan pengetahuan bagaimana kelompok pergerakan Islam di Indonesia melihat negara-bangsa serta sistem demokrasi yang sudah dipakai oleh banyak negara di dunia sebagai sistem Negara. Kekurangan dari penulisan ini ialah tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana gagasan Khilafah Islamiyah yang lantang gaungkan oleh HTI direspon oleh pemerintah Indonesia.

Referensi selanjutnya Asep Muhamad Iqbal and Zulkifli yang berjudul *“Islamic fundamentalism, nationstate and global citizenship: the case of Hizb utTahrir”*.¹⁶ Tulisan ini menunjukkan bahwa gerakan Islam fundamental merupakan kekuatan terbesar untuk mendorong bangkitnya kembali nilai-nilai yang ada dalam agama besar dunia kedalam kehidupan masyarakat modern. Pada tulisan ini gerakan Islam fundamental dianggap sebagai gerakan pemberontakan terhadap kondisi sosial-ekonomi, budaya dan politik. Menurut kaum fundamentalis hadirnya globalisasi mengancam kemurnian tradisi, agama dan budaya mereka sehingga untuk memberhentikan erosi agama, budaya dan tradisi mereka kaum fundamentalis menganggap pemberontakan adalah hal yang harus dilakukan. fundamentalisme Islam saat ini sudah menjadi kekuatan global karena telah berhasil berdiaspora melewati batas-batas Negara. Negara-bangsa dewasa

¹⁶ Asep Muhamad Iqbal and Zulkifli-Islamic fundamentalism, nationstate and global citizenship: the case of Hizb utTahrir (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 6, no.1 (2016), pp. 35-61, doi : 10.18326/ijims.v6i1.35-61)

ini tidak hanya ditantang dengan globalisasi “sekuler” akan tetapi juga dihadapkan pada tantangan dari globalisasi “Islam” seperti apa yang diusung oleh kaum pergerakan Islam fundamental. Fenomena pergerakan Islam Fundamental mengupayakan sebuah alternatif visi dan ide untuk menanggapi situasi global saat ini. Salah satunya adalah dengan menawarkan visi untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dunia yang tunggal dibawah naungan Khilafah Islamiyah.

Dengan demikian, tulisan ini menjadi referensi peneliti dalam melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh gerakan Islam fundamental seperti HT untuk menyebarkan ideologi yang dibawahnya ditengah derasnya arus Globalisasi serta situasi global saat ini. Kekurangan dalam penelitian ini adalah ada beberapa klaim penulis bahwa gerakan Islam fundamental melakukan kekerasan serta aksi terror dalam menyebarkan ideologi yang dibawahnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah erosi agama, tradisi serta budaya mereka oleh globalisasi. Namun tidak ditemukan data pada penelitian ini terkait tindakan kekerasan serta aksi terror yang dilakukan oleh HT sebagai gerakan Islam fundamental.

Selanjutnya tulisan dari Sabri Ciftci “*Islamophobia and Threat Perceptions: Explaining Anti-Muslim Sentiment in the West*”.¹⁷ Dalam tulisan ini Ciftci menjelaskan teori ancaman yang dirasakan juga dapat dijelaskan dengan alasan “*in-group*” dan “*out-group*”. Menurut pendekatan ini, persepsi ancaman mengarah pada perasaan negatif tentang anggota “*out-group*” dalam dua bentuk: ancaman realistik dan ancaman simbolis. Yang pertama adalah persepsi ancaman “eksistensial” yang terkait dengan “kekuatan politik dan

¹⁷ Sabri Ciftci (2012) *Islamophobia and Threat Perceptions: Explaining Anti-Muslim Sentiment in the West*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32:3, 293-309, DOI: 10.1080/13602004.2012.727291

ekonomi atau kesejahteraan fisik dan material dari 'dalam kelompok' atau anggotanya". Dalam nada ini, teori konflik realistik telah banyak digunakan untuk menjelaskan sikap terhadap imigran. Menurut teori ini, ketika sumber daya terbatas, persaingan atas sumber daya ini dapat memicu diskriminasi, prasangka, dan bahkan konflik di antara kelompok-kelompok yang bersaing memperebutkannya. Karena Muslim merupakan sebagian besar imigran di sebagian besar negara Barat, teori konflik realistik dan ancaman realistik yang dirasakan dapat digunakan untuk menjelaskan sentimen anti-Muslim di Barat. Argumennya di sini adalah bahwa Muslim bersaing untuk sumber daya ekonomi yang langka seperti pekerjaan, tunjangan kesejahteraan, dan barang-barang pendidikan dan karenanya akan menjadi sasaran prasangka. Perlu dicatat bahwa ancaman semacam ini melampaui bahaya ekonomi yang dirasakan hingga keuntungan materi dan mungkin mengandung persepsi bahaya apa pun terhadap kepentingan seseorang, termasuk kesejahteraan fisik. Oleh karena itu, jika Muslim dipandang sebagai kekerasan atau pendukung terorisme, mereka dapat dianggap sebagai ancaman bagi kesejahteraan fisik di masyarakat Barat.

Serangan 9/11 dan pemboman di beberapa ibu kota besar Eropa mungkin telah berkontribusi pada persepsi ancaman terkait dengan kesejahteraan fisik orang Barat. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap Muslim dan bahaya yang dirasakan menghasilkan banyak jenis dalam hal sikap. Sikap negara Barat mengklaim kaum Muslimin sebagai orang yang fanatik, kejam, dan mendukung terorisme yang mengancam ideologi dan nilai-nilai budaya mereka. Rasa terancam tersebut dimanfaatkan oleh media dan para pemimpin sayap kanan untuk menyuburkan Islamophobia di tengah masyarakat

barat. Banyak cara yang harus dilakukan agar dapat menghilangkan persepsi salah yang telah berkembang cukup luas. Salah satu cara yang dapat dijadikan solusi adalah membuat kebijakan yang mendukung untuk menjelaskan pengetahuan seputar Islam secara baik dan benar. Warga negara yang memiliki pengetahuan tentang Islam secara baik dan benar akan dapat menghilangkan persepsi ancaman terhadap kehadiran Islam sebagai sebuah aliran kepercayaan, sebab mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh opini media. Meskipun penulis tidak membahas tentang kondisi pergerakan Islam di Arab akan tetapi kesamaan konsep *threat perception* yang ada pada penulisan ini dapat memberikan gambaran bagi penulis bagaimana persepsi ancaman digunakan menjadi alat untuk menganalisis pergerakan Islam yang dibawa oleh organisasi transnasional.

Selanjutnya adalah referensi dari Asrudin Mirza Jaka Suryana, "*Constructivism Analysis of Threat Perception*".¹⁸ Tulisan ini menjelaskan tentang *Threat perceptions* dalam kerangka konstruktivisme. Dalam tulisan ini Penulis mendapatkan sebuah konstruksi dalam pikiran para eksekutor kebijakan urusan kerjasama luar negeri dari sebuah negara ketika melihat bagaimana cara kerja Negara lain. Realisme mencoba memberikan penjelasan tentang ancaman nyata dalam sistem internasional, ternyata tidak sepenuhnya tepat sasaran. Pada tulisan ini, realisme diposisikan sebatas perspektif atau ideologi yang menempel dalam pikiran para eksekutor kebijakan. Perspektif ini menghadirkan berbagai tanggapan dalam ragam doktrin strategis yang menangkal dan mengantisipasi berbagai ancaman yang ditunjukkan oleh negara lain terhadap negaranya.

¹⁸ Asrudin Mirza Jaka Suryana (2013), *Constructivism Analysis of Threat Perception*, *Journal of Global & Strategis*, Th. 7 No. 1

Threat perceptions negara terhadap negara lain pada dasarnya bisa menjadi penyebab terjadinya perang. Negara pembuat banyak kebijakan sebagai bukti bahwa *threat perceptions* tersebut ada. Persepsi sebuah negara digunakan untuk menyusun formulasi kebijakannya. Kebijakan berdasarkan cara pandang dapat dipahami dengan menempatkan unsur manusia sebagai pusat studi. Dalam kerangka keilmuan seperti ini, konstruktivisme memberikan kontribusi berarti sebagai alat analisis. Tulisan ini membantu pembaca memahami konstruksi pembuat kebijakan/keputusan mengenai persepsi ancaman, sekaligus untuk mematahkan asumsi realisme mengenai objektivitas anarki dalam politik internasional. Meskipun penulis tidak membahas mengenai analisis konstruktivisme terhadap *threat perception* namun tulisan ini dapat membantu penulis bagaimana *threat perceptions* dapat mendorong para pemangku kebijakan untuk melahirkan sebuah kebijakan.

Referensi terakhir adalah tulisan dari Raymond Cohen yang berjudul "*Threat Perception in International Crisis*".¹⁹ Dalam tulisannya Raymond Cohen menjelaskan tentang persepsi ancaman digunakan sebagai variabel untuk menentukan aksi-reaksi di dunia Internasional. Raymond Cohen menjelaskan persepsi ancaman dalam tulisannya dengan banyak menggunakan studi kasus histori permasalahan internasional yang pernah terjadi dimasa lalu. Dalam tulisan ini dijelaskan Ketika ada isyarat ancaman meski musuh tidak memiliki niat jahat tindakan defensif dapat dilakukan sebagai bentuk dari upaya pertahanan. Melalui kasus-kasus yang di paparkan oleh Cohen ternyata cohen berusaha membantu

¹⁹ Threat Perception in International Crisis Author (s): Raymond Cohen Source : Political Science Quarterly, Vol. 93, No. 1 (Spring, 1978), pp. 93-107Published by: The Academy of Political Science Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2149052> .

untuk membedakan antara dua tahap persepsi: Tahap awal berupa pengamatan, bagaimana isyarat diterima; dan tahap kedua adalah penilaian isyarat yang dirasakan dievaluasi dan didefinisikan sebagai sebuah ancaman atau bukan ancaman. Dalam jurnalnya Cohen membuat empat indikator untuk melihat persepsi ancaman. Keempat indikator tersebut adalah Artikulasi para pembuat kebijakan, deskripsi pengamat kontemporer, usaha pembentukan respon alternatif dan *coping process* untuk menanggapi ancaman. Secara sistematis Cohen mengembangkan gagasan bahwa banyak masalah perilaku internasional, dan khususnya perilaku strategis secara struktural sangat mirip dengan masalah kehidupan. Semisal tanggapan Cohen perihal negara-negara besar yang seharusnya bisa menurunkan ego-egonya untuk tidak terus menerus membangun persepsi ancaman yang berlebihan terhadap Negara lain dan menyepakati batasan penggunaan senjata dan ruang lingkup perang jika tidak beberapa konflik dapat berpotensi menjadi perang nuklir.

Tulisan Cohen ini dapat membantu penulis dalam memahami persepsi ancaman melalui kasus-kasus internasional yang dipaparkan oleh Cohen. Konsep *Threat perceptions* yang ada dalam penulisan ini dapat memberikan gambaran bagi penulis bagaimana persepsi ancaman digunakan menjadi pisau analisis pada penelitian ini. Konsep *Threat perceptions* akan penulis gunakan untuk menganalisis ancaman yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia terkait wacana khiafah yang dibawa oleh HT.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Threats Perceptions

Dalam literatur Hubungan Internasional, *threat* atau ancaman diartikan

kondisi ketika aktor memiliki kuasa yang dapat menyebabkan hasil buruk tertuju kepada aktor lain. *Threat* atau ancaman dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu ancaman yang dirasakan oleh individu dan ancaman yang dirasakan kelompok. Ancaman yang dirasakan kelompok, dari internal bisa berupa serangan militer, krisis ekonomi, maupun ancaman budaya. Sedangkan ancaman untuk individu meliputi keamanan fisik, pendapatan dan kekayaan pribadi, termasuk nilai-nilai yang dianut dan aliran kepercayaan pribadi. Ancaman sering kali dirasakan saat seorang aktor mempunyai kemampuan yang lebih besar dari pada aktor lainnya. Ancaman dapat disebabkan karena ketidakpercayaan atau pengalaman buruk masa lalu terhadap aktor lain. Inilah yang menjadikan seorang aktor mempersepsikan aktor lainnya sebagai bahaya atau ancaman, tindakan ini dikenal dengan *threats perceptions* (persepsi ancaman).²⁰ Perihal persepsi ancaman, Walt menjelaskan bahwa persepsi ancaman masuk kedalam bagian dari pemikiran rasionalis yang mengedepankan pondasi terbangunnya ancaman yang disebabkan oleh empat faktor yaitu *offensive power*, *aggregate power*, *geographic proximity*, dan *offensive intention*.²¹ Retamero dan Rousseau mengatakan bahwa Persepsi ancaman adalah akibat dari ketimpangan kekuasaan diantara kelompok.²²

Sedangkan *threat perception* menurut Cohen merupakan sebagai tolak ukur yang menghasilkan aksi dan reaksi dalam krisis internasional. Sederhananya, persepsi ancaman dimaknai sebagai keadaan ketika seorang

²⁰ David L. Rousseau, Identity, Power, and Threat Perception A Cross-National Experimental Study, *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51 No. 5, Oktober 2007, hal.744-771

²¹ Tim Scheerder, Threat Perception Politics: A Comparative Case Study into the Difference in Threat Perception Between Terrorism and Climate Change in the United States, Radboud University Nijmegen, 2012, hal. 8

²² David L. Rousseau dan Rocio Garcia-Retamero, Identity, Power, and Threat Perception: A Cross National Experimental Study, *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51 No. 5, Oktober 2007, hal. 744-771.

aktor merasakan aktor lainnya dengan kapabilitasnya yang lebih besar merupakan sebuah ancaman, wilayah geografis yang berdekatan, kurangnya kepercayaan, maupun kejadian dimasa lalu yang menyebabkan aktor tersebut merasa perlu membuat upaya pertahanan. Raymond Cohen menjelaskan persepsi ancaman dalam tulisannya dengan banyak menggunakan studi kasus histori permasalahan internasional yang pernah terjadi dimasa lalu. Dalam tulisan ini dijelaskan Ketika ada isyarat ancaman meski musuh tidak memiliki niat jahat tindakan defensif dapat dilakukan sebagai bentuk dari upaya pertahanan. Melalui kasus-kasus yang di paparkan oleh Cohen ternyata cohen berusaha membantu untuk membedakan antara dua tahap persepsi: Tahap awal berupa pengamatan, bagaimana isyarat diterima; dan tahap kedua adalah penilaian isyarat yang dirasakan dievaluasi dan didefinisikan sebagai sebuah ancaman atau bukan ancaman.²³

Teori Persepsi Ancaman yang jelaskan oleh Raymond Cohen digunakan dalam penulisan ini. Melalui tulisannya yang berjudul *Threat Perception in International Crisis*, Cohen mencoba menggambarkan persepsi Ancaman sebagai variabel penentu aksi-reaksi krisis di dunia internasional. Cohen mengatakan sekalipun sebuah kejadian berbahaya sudah terjadi, tetapi jika ancaman tidak dirasakan, upaya pertahanan tidak perlu dilakukan. Begitu pun juga sebaliknya, apabila ada ancaman dirasakan, upaya pertahanan akan dilakukan walaupun musuh tidak melakukan penyerangan. Oleh sebab itu, uapaya pertahanan dapat diartikan sebagai tindakan yang harus dipilih untuk mengatasi bahaya ketika sinyal bahaya dan ancaman itu dirasakan. Cohen

²³ Raymond Cohen, Threats Perception In International Crisis, Political Science Quarterly, Vol. 3 No. 1, 1978, hal. 89-92.

dalam teorinya kebanyakan memberikan penjelasan dengan menjelaskan melalui peristiwa yang sudah terjadi. Cohen di dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa para pembuat kebijakan seringkali melakukan justifikasi terhadap bahaya ketika merasakan ada isyarat ancaman dalam pikirannya.²⁴

Untuk memberikan bukti adanya ancaman yang dirasakan aktor ada empat faktor operasional dari *threats perception* yang dinyatakan oleh Cohen. Pertama, artikulasi dari pembuat keputusan seperti menteri dan pihak terkait yang merupakan bentuk penilaian eksekutor keputusan serta reaksi terhadap isyarat yang dianggap mengancam. Kedua, gambaran yang disampaikan oleh pengamat kontemporer, diplomat negara lain, atau sekutu negara tersebut. Ketiga, negara mencoba melakukan tindakan alternatif seperti konsultasi internal, memberikan informasi lebih jelas, dan meminta dukungan eksternal untuk menanggapi ancaman yang dirasakan. Keempat, pembuat keputusan memberikan respon terhadap ancaman berupa pertahanan seperti penguatan mobilitas sumber daya, tindakan diplomatik, membuat kebijakan dan lainnya yang disebut juga sebagai *coping process*.

Persepsi ancaman itu sendiri menurut Cohen didorong oleh *predisposition factors* diantaranya adalah rasa tidak percaya, pengalaman masa lalu, kejadian tak terduga, dan kecemasan personal secara garis besar. Cohen menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu dan ketidakpercayaan yang memiliki hubungan sebab akibat. Ketika ada pengalaman buruk dimasa lalu antar aktor dapat menghilangkan rasa percaya satu sama lainnya, kemudian menimbulkan persepsi ancaman pada salah satu aktor atas tindakan aktor lainnya. Kedua

²⁴ Raymond Cohen, *Threats Perception In International Crisis*, *Political Science Quarterly*, Vol. 3 No. 1, 1978, hal. 93-107.

peristiwa tak terduga dan kecemasan personal yang juga memiliki hubungan sebab akibat. Ketika salah satu aktor melakukan tindakan tidak terduga dapat membuat aktor lain mengalami kecemasan, sehingga memunculkan persepsi ancaman terhadap aktor yang melakukan tindakan tidak terduga tersebut.

Konsep *threat perception* yang dikemukakan oleh Raymond Cohen sebagai alat untuk menganalisis respon yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Adanya isyarat ancaman yang dirasakan oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan respon terhadap wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT. Serta Indikator-indikator yang ada dalam *threat perception* dapat penulis gunakan untuk membantu menganalisis respon yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, konsep ini juga membantu peneliti dalam melihat bagaimana proses lahirnya respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi eksistensi wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan dan prosedur yang akan digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan dari topik ini sebagai bagian dari kajian hubungan internasional.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian akan ditekankan pada pencarian fakta dan data terkait persepsi ancaman yang dapat mempengaruhi respon negara. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan ini agar penulis dapat memberikan deskripsi dari

respon pemerintah Indonesia terkait wacana yang dibawa oleh organisasi transnasional.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk membuat penelitian ini tetap berpijak pada fokus utamanya dan tidak meluas ke berbagai bahasa yang menjadikannya jauh dari pokok permasalahan, maka peneliti menetapkan batasan untuk penelitian ini yaitu dalam kurun waktu 2017-2021. Peneliti akan berusaha melihat bagaimana perjalanan dari respon pemerintah Indonesia terhadap sebuah wacana bermula dari dibubarkannya HTI pada 2017 serta respon lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir paham atau ideologi yang dibawa oleh organisasi Islam transnasional yang masuk ke Indonesia sampai pada tahun 2021.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan penjelasan Mohtar Mas'ood adalah objek atau unit yang perilakunya hendak dijelaskan dan dideskripsikan.²⁵ Unit analisis dalam penelitian ini adalah Respon Pemerintah Indonesia. Sedangkan unit yang akan mempengaruhi atau berdampak terhadap unit analisis yang perilakunya akan kita amati merupakan unit eksplanasi atau dikenal juga sebagai variabel independen.²⁶ Unit eksplanasi atau variabel independen sangatlah penting karena dapat memberikan penjelasan tentang unit atau objek yang perilakunya akan diamati, didefinisikan, serta diprediksi. Unit eksplanasi pada penelitian ini

²⁵ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta, 1990), <https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/repository/repository/19046d29da575bd76967b6cad7668d26.df>

²⁶ Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, p.39

adalah wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa *library research* atau studi kepustakaan. Studi pustaka pada dasarnya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber bacaan dan literatur akademik seperti jurnal, buku, majalah, berita, dan *website*. Data yang akan dikumpulkan adalah terkait dinamika wacana Khilafah Islamiyah di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia terkait penyebaran wacana Khilafah Islamiyah di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir penyebaran Ideologi yang dibawa oleh organisasi Transnasional. Pengumpulan data diatas dilakukan dengan menggunakan kata kunci khilafah Islamiyah, persepsi ancaman, HT, HTI, dan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan data yang sesuai.

Merujuk pada kerangka konseptual yang dipakai pada penelitian ini merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Raymond Cohen yang berjudul “Threat perceptions in International Crisis”. Akun resmi BNPT untuk melihat mekanisme dari program deradikalisasi yang dibuat oleh pemerintah. Serta beberapa surat kabar yang memuat pernyataan dan tanggapan para aktor Negara terhadap pergerakan HT ataupun terkait wacana pendirian Khilafah Islamiyah yang diusung oleh Organisasi Islam Transnasional.

Selanjutnya untuk menganalisis respon yang diambil oleh pemerintah Indonesia penulis dapat melihat peneliti akan merujuk pada jurnal yang di tulis oleh Raymond Cohen. Respon tersebut akan diperkuat dengan bukti yang penulis

dapatkan dari berita-berita pada website resmi terkait sikap pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui aktor-aktor negara serta analisis respon ini akan di bantu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif yang akan difokuskan pada analisis mengenai respon pemerintah Indonesia terhadap wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT melalui data-data sekunder seperti jurnal, laporan, dan surat kabar yang membutuhkan pemahaman serta analisis terhadap sumber tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran Miles, Huberman, dan Saldana terdapat tiga alur kegiatan yang akan dilewati untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁷

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memusatkan, atau mengabstraksi data yang muncul dari berbagai sumber empiris. Dalam penelitian ini, kondensasi data akan dilakukan dengan menggunakan kata kunci khilafah Islamiyah, persepsi ancaman, HT, HTI, dan pemerintah Indonesia dalam proses pencarian data agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Penyajian Data

²⁷ Michael Huberman and Matthew B. Miles, "Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook," 3rd Edition (SAGE Publications, 2014), 3–16, <http://www.uk.sagepub.com/books/Book239534?siteId=sage-uk>.

Penyajian data secara sederhana adalah pengorganisasian dan penyusunan data yang memungkinkan penyimpulan atas suatu aksi. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian dan tabel. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber sekunder mengenai aktivitas HT dalam menyebarkan ideologinya di Indonesia. Penggunaan tabel juga akan dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dimudahkan dengan adanya pengkategorian data yang sudah disajikan

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari literatur terdahulu yang dijadikan bahan referensi dan perbandingan penelitian, kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis data, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II

Dinamika Wacana Khilafah Islamiyah Di Indonesia

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana dinamika wacana Khilafah Islamiyah di Indonesia. Mulai dari masuknya HT ke Indonesia, kemudian pergerakan dan penyebaran paham khilafah di Indonesia, selanjutnya akan dibahas tentang pembubaran HTI. Dan pembahasan pada bab ini akan ditutup dengan eksistensi wacana khilafah Islamiyah pasca pembubaran HTI

BAB III

Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana radikalisme agama di Indonesia. upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran paham radikal. Membahas program derdikalisasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia serta melihat tinjauan praksis dan teoritis dari nasionalisme.

BAB IV

Analisis Persepsi Ancaman Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah

Pada bagian ini akan berisikan analisis dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap wacana Khilafah Islamiyah. Pada bab ini peneliti akan menganalisis respon yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang akan dijelaskan pada bab sebelumnya dengan menggunakan konsep *threat perceptions* milik

Raymond Cohen.

BAB V

Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang akan berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian topik ini.

